



## Economics Development Analysis Journal

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>

# Distribusi Fungsi Pelayanan Kecamatan dan Interaksi antar Kecamatan di Kabupaten Tegal

Nur Budi Setiawan<sup>1✉</sup>, Bambang Prishardoyo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>PT Central Santosa Finance

<sup>2</sup>Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima September

2016

Disetujui Oktober 2016

Dipublikasikan

November 2016

*Keywords:*

*the service function distribution, the interaction between regency, scalogram, guttman scale, gravity.*

### Abstrak

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi fungsi pelayanan kecamatan serta interaksi antar kecamatan pada setiap Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil penelitian dari kedua masalah yang diperoleh bahwa Distribusi fungsi pelayanan menunjukkan bahwa Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk sedikit belum tentu jumlah fasilitasnya juga sedikit, dengan kata lain terjadi ketidakmerataan fasilitas di Kabupaten Tegal. Tingkat interaksi menunjukkan bahwa Kecamatan yang memiliki jumlah tingkat interaksi tertinggi adalah Kecamatan Margasari, dan Kecamatan yang memiliki jumlah Interaksi Terendah adalah Kecamatan Talang. Keterkaitan antara Distribusi fungsi pelayanan dengan Interaksi antar wilayah menunjukkan semakin rendah jumlah fasilitas suatu Kecamatan maka semakin tinggi tingkat interaksi dengan Kecamatan lainnya, hal ini terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah, maka daerah tersebut harus mengakses fasilitas daerah lainnya.

### Abstract

*Public service is any service activity organized by service providers as addressing the needs of service recipients, public services have become increasingly important because it is always in touch with people who have a diversity of interests and goals. Therefore, this study aims to determine the distribution of the service function and interaction among sub-districts in each Regional Unit Development (SWP) in Tegal regency. Based on the research results obtained from the second issue that the distribution of the service function indicates that the sub-district which has a population of a little bit is not necessarily the number of facilities are also a little bit, in other words going inequality facilities in Tegal regency. The level of interaction indicate that the Regency which have the highest number of population is Margasari Regency, and the Regency that have the lowest number of interaction is Talang Regency. The relevance between the service function distribution with the interaction between region indicate that the number of facilities a district is lower, then the level of interaction with other Regency is higher. It happened because to fulfill the requirement a region, so that region have to access the facility of other regions.*

© 2016 Universitas Negeri Semarang

ISSN 2252-6765

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:

Jl. Jenderal Sudirman No.172 B & C, Salamanmloyo,  
Semarang Barat, Cabean, Semarang Bar., Kota Semarang,  
Jawa Tengah 50149  
E-mail: budisetiawan408@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus terus dilakukan oleh institusi pelayanan publik baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Pada tahun 2003 pemerintah menggulirkan paradigma baru dalam pelayanan publik yakni dengan mencanangkan Bulan Peningkatan Pelayanan Publik (BP3). Gerakan ini dilakukan setelah pemerintah mendapatkan berbagai sorotan tentang buruknya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kinerja layanannya diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63/KEP/PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan maksud sebagai acuan bagi seluruh penyelenggaran pelayanan publik dalam pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya, serta bertujuan untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan (Mulyanti, 2007).

Pemerintah merupakan organisasi birokrasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam hal ini institusi pemerintah memberikan pelayanan untuk

memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya serta diperlukan peningkatan pelayanan publik yang berkesinambungan guna meningkatkan peranan pemerintah terhadap tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan dalam mensejahterakan masyarakat pada pelaksanaan pemerintahan yang ditunjang dengan ketersediaan pelayanan infrastuktur melalui pusat-pusat pembangunan.

Pusat-pusat pembangunan diharapkan dapat menjadi titik tumpu bagi tumbuh berkembangnya wilayah dengan memperhatikan hierarki perkotaan yang sangat berkaitan dengan kepentingan umum pada masing-masing kota. Tujuannya yaitu agar dapat diperkirakan luas wilayah pengaruh, jenis dan tingkat/mutu fasilitas kepentingan umum yang perlu dibangun dan jangkauan pelayanannya (Tarigan, 2005).

Dengan adanya konsep pusat-pusat pembangunan diharapkan menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan pelayanan infratsruktur dimana wilayah-wilayah yang menjadi pusat kegiatan lokal dan wilayah disekitarnya yang ada di Kabupaten Tegal dapat saling memberi manfaat. Hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 pasal 6 huruf (a, b, c) tentang Rencana Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan dengan menetapkan; Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yakni Slawi dan Adiwerna , PKLp yakni Dukuhturi, dan sisanya menjadi Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK).

Kabupaten Tegal merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota Slawi, Kabupaten Tegal terdiri atas 18 kecamatan antara Lain: Adiwerna, Balapulang, Bojong, Bumijawa, Dukuhturi, Dukuhwaru, Jatinegara, Kedungbanteng, Kramat, Lebaksiu, Margasari, Pagerbarang, Pangkah, Slawi, Suradadi, Talang, Tarub, dan Warureja dengan jumlah penduduk sebesar 1.415.009 jiwa. Jumlah infrastruktur yang ada di Kabupaten Tegal sebesar 38.490.

**Tabel 1.** Jumlah Sarana & infrastruktur tiap Kecamatan di Kabupaten Tegal

Kecamatan	Jumlah
Adiwerna	7.250
Talang	4.302
Pangkah	3.229
Kramat	2.577
Lebaksiu	2.568
Balapulang	2.483
Dukuhturi	2.442
Tarub	2.047
Dukuhwaru	1.973
Margasari	1.483
Slawi	1.404
Bojong	1.232
Bumijawa	1.131
Suradadi	1.094
Jatinegara	959
Pagerbarang	904
Warureja	832
Kedungbanteng	580
Jumlah Infrastruktur	38.490

Sumber : BPS Kab. Tegal Dalam Angka 2014

Tabel 1 menunjukkan jumlah sarana & infrastruktur Kabupaten Tegal sebesar 38.490 dengan Kecamatan Adiwerna memiliki sarana & infrastruktur yang besar dibandingkan dengan Kecamatan yang lainnya di Kabupaten Tegal dengan jumlah sarana & infrastruktur sebesar 7.250 dan yang terendah terdapat pada Kecamatan Kedungbanteng yaitu 580. , dari tabel 1.1 ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakmerataan infrastruktur yang tinggi antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lainnya, dari fenomena ini maka perlu dilakukan penelitian mengenai "*Distribusi Fungsi Pelayanan Kecamatan Dan Interaksi Antar Kecamatan Pada Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Di Kabupaten Tegal*" yang bertujuan Menganalisis distribusi fungsi pelayanan Kecamatan yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta Kecamatan yang menjadi Pusat Pelayanan

Kegiatan (PPK)/ Pusat Kegiatan Lokal Pembantu (PKLp) pada setiap Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Kabupaten Tegal dan menganalisis tingkat interaksi antar Kecamatan yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta Kecamatan yang menjadi Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK)/ Pusat Kegiatan Lokal Pembantu (PKLp) pada setiap Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Kabupaten Tegal.

## METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber yang terkait seperti data yang tercantum dalam BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Tegal. Metode tersebut digunakan karena penelitian menggunakan data sekunder yang tersedia di berbagai sumber. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data jumlah penduduk, jarak antar kecamatan serta jumlah dan jenis fasilitas pelayanan yang terdapat di masing-masing kecamatan di Kabupaten Tegal.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik-teknik tertentu untuk menghasilkan ketajaman analisa. Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Distribusi Fungsi Pelayanan

Skalogram digunakan untuk mengidentifikasi konsentrasi dari pusat-pusat pelayanan berdasarkan jumlah dan keragaman fasilitas sosial ekonomi yang tersedia dimasing-masing pusat tersebut, dengan asumsi bahwa konsentrasi adalah kemampuan dari suatu pusat pelayanan untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi yang dikumpulkan adalah nama fasilitas, jumlah fasilitas, jenis fasilitas serta jumlah penduduk yang tersedia pada setiap kecamatan di Kabupaten Bombana (Buyung sarita 2014).

Skalogram digunakan untuk mengidentifikasi konsentrasi dari pusat-pusat pelayanan berdasarkan jumlah dan keragaman fasilitas sosial ekonomi yang tersedia dimasing-

masing pusat tersebut, dengan asumsi bahwa konsentrasi adalah kemampuan dari suatu pusat pelayanan untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi yang dikumpulkan adalah nama fasilitas, jumlah fasilitas, jenis fasilitas serta jumlah penduduk yang tersedia pada setiap kecamatan di Kabupaten Tegal.

Setelah dilakukan perhitungan, sebelum memberikan peringkat terhadap masing-masing unit pemukiman, terlebih dahulu dilakukan perhitungan koefisien reproduksibilitas dan koefisien skalabilitas, masing-masing dengan rumus:

## Keterangan:

Kr = Koefisien reproduksibilitas  
 E = Jumlah kesalahan  
 N = Perkalian dari jumlah fungsi dan satuan kecamatan

Keterangan:

Ks = Koefisien skalabilitas  
 E = Jumlah kesalahan  
 N = Perkalian dari jumlah fungsi dan satuan kecamatan  
 Tn = Jumlah satuan kecamatan yang memiliki suatu fungsi.

### 1. Interaksi antar Kecamatan

Analisis Tingkat Keterkaitan Antar Kecamatan Sebagai Pusat Pelayanan Pada Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Kabupaten Tegal, Keterkaitan antar kecamatan secara teoritik diukur berdasarkan data jumlah penduduk dan jarak antar kecamatan, dengan menggunakan Rumus Gravitasi (*New Ton*) yaitu:

### Keterangan :

Iij = Taksiran jarak batas gaya tarik kecamatan i dan j di Kab. Tegal

Ai Aj = Besaranya jumlah penduduk  
 kecamatan i dan j di Kab. Tegal  
 Dij = Ukuran jarak antara i dan j di  
 Kab.Tegal  
 a,b,c = Parameter eksponensial

## 2. Overlay

Analisis Overlay digunakan untuk menentukan rencana pengembangan Infrastruktur dengan menggabungkan alat analisis dengan tujuan untuk menyaring hasil analisis yang paling baik, dimana hasil akhir dapat merupakan beberapa kemungkinan ataupun hanya merupakan hasil yang diinginkan saja. Dalam penelitian ini, analisis overlay merupakan rangkuman antara hasil dari analisis Skalogram, Skala Guttman dengan Gravitasi yaitu Distribusi Fungsi Pelayanan, Hirarki Fungsi Pelayanan dan Interaksi Antar Kecamatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Distribusi Fungsi Pelayanan Kecamatan di Kabupaten Tegal**

Hasil identifikasi dilapangan menunjukkan bahwa pada tabel Skalogram memberikan informasi bahwa berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan yang ditetapkan sebagai indikator untuk mengetahui besarnya fungsi pelayanan kecamatan (sejumlah 22 jenis fasilitas pelayanan), semua fasilitas pelayanan tersedia pada seluruh kecamatan. Berikut tabel penyebaran pelayanan infrastruktur di Kebupaten Tegal.

Tabel 2 menunjukkan bahwa Kecamatan Adiwerna (rangking 1) memiliki jumlah fasilitas tertinggi dibandingkan dengan Kecamatan lainnya, tetapi tidak memiliki jumlah penduduk yang paling banyak, berbeda halnya dengan Kecamatan Pangkah yang berada di rangking ke 3 memiliki jumlah fasilitas yang tidak terlalu banyak tetapi memiliki jumlah penduduk yang paling besar dibandingkan dengan Kecamatan lainnya. Kecamatan Talang yang berada di rangking ke 2 dengan total fasilitas sebesar 4.302 juga hanya memiliki jumlah penduduk sebesar 99.490 jiwa, bandingkan dengan Kecamatan Kramat yang berada di rangking ke 4 dengan

jumlah fasilitas 2.577 tetapi memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan Kecamatan Talang yakni sebesar 107.666 jiwa.

**Tabel 2.** Penyebaran pelayanan Infrastruktur di Kabupaten Tegal

Kecamatan	Penduduk	Fasilitas	Rangking
Adiwerna	119.083	7.250	1
Talang	99.490	4.302	2
Pangkah	1.00.086	3.229	3
Kramat	107.666	2.577	4
Lebaksiu	83.487	2.568	5
Balapulang	81.485	2.483	6
Dukuhturi	88.530	2.442	7
Tarub	77.320	2.047	8
Dukuhwaru	59.006	1.973	9
Margasari	95.150	1.483	10
Slawi	70.574	1.404	11
Bojong	61.675	1.232	12
Bumijawa	83.943	1.131	13
Suradadi	81.169	1.094	14
Jatinegara	53.833	959	15
Pagerbarang	52.341	904	16
Warureja	59.957	832	17
Kedungbanteng	40.214	580	18

Sumber: Diolah dari Tegal Dalam Angka Tahun 2014

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal, Kecamatan yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kecamatan Slawi hanya memiliki jumlah fasilitas sebesar 1.404 dan jumlah penduduk sebesar 70.574 jiwa dengan menduduki rangking ke 11. Kecamatan yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal Pembantu (PKLp) yaitu Kecamatan Kecamatan Dukuhturi hanya memiliki jumlah fasilitas sebesar 2.442

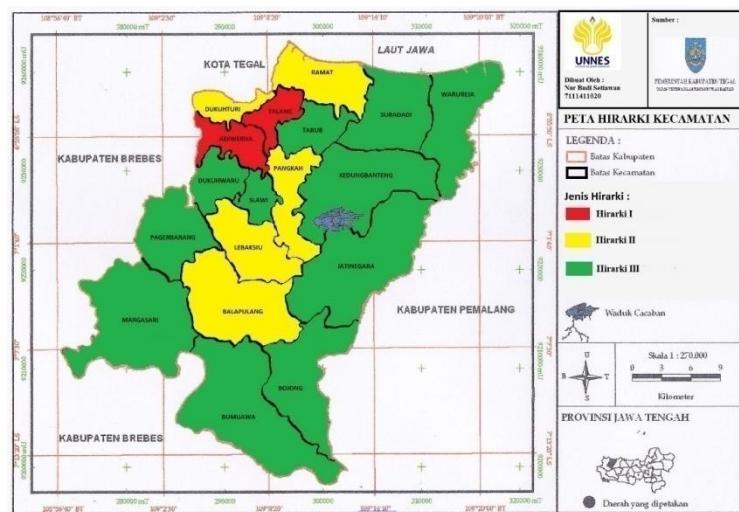
dan jumlah penduduk sebesar 88.530 berada di rangking ke 7. Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa Kecamatan yang memiliki fasilitas banyak belum tentu jumlah penduduknya juga banyak, begitu pula dengan sebaliknya Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling besar belum tentu memiliki fasilitas yang besar pula.

Dalam menentukan Hierarki perlu digunakan uji skala Guttman, hasil perhitungan skala Guttman dalam penelitian ini yaitu Koefisien Reproduksibilitas ( $K_r$ ) serta Koefisien Skalabilitas ( $K_s$ ), menunjukkan nilai  $K_r = 0,915$  (lebih besar dari 0,90) dan nilai  $K_s = 0,831$  (lebih besar dari 0,60). Artinya bahwa hierarki kecamatan berdasarkan jumlah dan keragaman jenis fasilitas pelayanan yang ada pada analisis skalogram bisa diterima. Dengan kata lain hierarki kecamatan yang menggambarkan besarnya fungsi pelayanan berdasarkan jumlah dan keragaman jenis fasilitas pelayanan pada analisis skalogram mempunyai tingkat kesalahan yang masih dapat diterima.

Hasil Hirarki menunjukkan bahwa ada 2 Kecamatan yang memiliki tingkat fasilitas tinggi (Hirarki I) yaitu Kecamatan Adiwerna dan Kecamatan Talang, 5 kecamatan berikutnya memiliki tingkat fasilitas sedang (Hirarki II) adalah Kecamatan Pangkah, Kecamatan Kramat, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Balapulang, dan Kecamatan Dukuhturi, dan 11 Kecamatan berada pada tingkat fasilitas rendah (Hirarki III) lihat pada Gambar 1.

#### Tingkat Interaksi Antar Kecamatan di Kabupaten Tegal

Berdasarkan data jumlah penduduk dan jarak antar pusat-pusat dengan menggunakan formulasi rumus gravitasi yang dapat dihitung batas daya tarik setiap kecamatan pada Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Kabupaten Tegal, hasil perhitungan gravitasi lihat pada Tabel 3.



**Gambar 1.** Hirarki Kabupaten Tegal, BPS Kab. Tegal 2014

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Tegal 2014

**Tabel 3.** Jumlah Interaksi Antar Kecamatan Kabupaten Tegal

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Interaksi
Margasari	95.150	8
Pangkah	1.00.086	7
Dukuhwatu	59.006	6
Slawi	70.574	6
Warureja	59.957	6
Kedungbanteng	40.214	6
Kramat	107.666	5
Balapulang	81.485	5
Tarub	77.320	5
Bumijawa	83.943	5
Jatinegara	53.833	5
Pagerbarang	52.341	5
Adiwerna	119.083	4
Lebaksiu	83.487	4
Bojong	61.675	4
Suradadi	81.169	4
Talang	99.490	3
Dukuhturi	88.530	3

Sumber : Diolah dari BPS Kab. Tegal 2014

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah interaksi antar Kecamatan yang terbanyak adalah Kecamatan Margasari dengan jumlah interaksi dengan 8 Kecamatan yang ada disekitarnya, sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah interaksi antar Kecamatan

paling sedikit adalah Kecamatan Dukuhturi yakni sebanyak 3 interaksi dengan Kecamatan-kecamatan yang ada disekitarnya.

Kecamatan Pangkah yang memiliki jumlah penduduk terbesar hanya menempati urutan kedua yakni hanya berinteraksi dengan 7

Kecamatan yang ada disekitarnya, sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu Kecamatan Kedungbanteng mempunyai jumlah interaksi sebanyak 6 Kecamatan.

#### **Keterkaitan antara Distribusi Fungsi Pelayanan dengan Interaksi Antar Wilayah.**

Dalam penelitian ini, analisis overlay merupakan rangkuman antara hasil dari analisis Skalogram, Skala Guttman dengan Gravitas yaitu Distribusi Fungsi Pelayanan, Hirarki Fungsi Pelayanan dan Interaksi Antar Kecamatan. Hasil Overlay dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4.** Hasil Overlay Skalogram, guttman, dan graftasi

Kecamatan	Fasilitas	Hirarki	Jumlah Interaksi
Adiwerna	7.250	I	4
Talang	4.302	I	3
Pangkah	3.229	II	7
Kramat	2.577	II	5
Lebaksiu	2.568	II	4
Balapulang	2.483	II	5
Dukuhturi	2.442	II	3
Tarub	2.047	III	5
Dukuhwatu	1.973	III	6
Margasari	1.483	III	8
Slawi	1.404	III	6
Bojong	1.232	III	4
Bumijawa	1.131	III	5
Suradadi	1.094	III	4
Jatinegara	959	III	5
Pagerbarang	904	III	5
Warureja	832	III	6
Kedungbanteng	580	III	6

Berdasarkan Hasil analisis Overlay Kecamatan Adiwerna memiliki fasilitas paling lengkap diantara kecamatan lainnya menempati hirarki I, tetapi hanya memiliki tingkat interaksi tinggi di 4 kecamatan saja. Hal ini berbanding terbalik dengan Kecamatan Margasari yang memiliki tingkat interaksi tinggi di 8 Kecamatan, tetapi memiliki fasilitas yang tidak lengkap dengan menempati hirarki III. Data diatas menunjukan bahwa semakin rendah jumlah fasilitas suatu Kecamatan maka semakin tinggi tingkat interaksi dengan Kecamatan lainnya, hal ini terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah, maka daerah tersebut harus mengakses fasilitas daerah lainnya.

#### **SIMPULAN**

Simpulan dari pembahasan diatas adalah (1) Distribusi fungsi pelayanan menunjukan bahwa Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk sedikit belum tentu jumlah fasilitasnya juga sedikit, begitu pula dengan sebaliknya Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling besar belum tentu memiliki jumlah fasilitasnya besar pula, dengan kata lain terjadi ketidakmerataan fasilitas di Kabupaten Tegal. Kecamatan yang memiliki fasilitas yang tinggi atau Hirarki I adalah Kecamatan Adiwerna dengan jumlah fasilitas sebesar 7.250, terendahnya adalah Kecamatan Talang dengan total fasilitas sebesar 4.302, Kecamatan yang

memiliki Jumlah fasilitas sedang atau Hirarki II tertinggi adalah Kecamatan Pangkah dengan total fasilitas sebesar 3.229, terendahnya adalah Kecamatan Dukuhturi dengan total fasilitas sebesar 2.442 dan Kecamatan yang memiliki Jumlah Fasilitas Terendah atau Hirarki III tertingginya adalah Kecamatan Tarub dengan total fasilitas sebesar 2.047, terendahnya adalah Kecamatan Kedungbanteng dengan total Fasilitas sebesar 580, (2) Tingkat interaksi menunjukkan bahwa Kecamatan yang memiliki jumlah tingkat interaksi tertinggi adalah Kecamatan Margasari dengan jumlah interaksi tertinggi di 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Balapulang dengan nilai interaksi 64.076.841, Kecamatan Lebaksiu dengan nilai interaksi 27.487.156, Kecamatan Bojong dengan nilai interaksi 20.305.800, Kecamatan Pagerbarang dengan nilai interaksi 13.795.695, Kecamatan Adiwerna dengan nilai interaksi 13.472.945, Kecamatan Pangkah dengan nilai interaksi 13.063.351, Kecamatan Bumijawa dengan nilai interaksi 12.779.482, dan Kecamatan Slawi dengan nilai interaksi 12.693.981, dan Kecamatan yang memiliki jumlah Interaksi Terendah adalah Kecamatan Talang dengan jumlah Interaksi tertinggi di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kedungbanteng dengan nilai interaksi 900.200.443.500, Kecamatan Adiwerna dengan nilai interaksi 2.961.891.917, Kecamatan Dukuhturi dengan nilai interaksi 550.490.606, (3) Keterkaitan antara Distribusi fungsi pelayanan dengan Interaksi antar wilayah menunjukkan semakin rendah jumlah fasilitas suatu Kecamatan maka semakin tinggi tingkat interaksi dengan Kecamatan lainnya, hal ini terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah, maka daerah tersebut harus mengakses fasilitas daerah lainnya.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah (1) Memenuhi arahan tata jenjang pemukiman sebagaimana dalam struktur tataruang di Kabupaten Tegal maka pemerintah perlu mengembangkan fasilitas pelayanan baik itu pelayanan social maupun ekonomi yang dapat menciptakan akumulasi barang dan modal bagi pengembangan wilayah setiap Kecamatan, (2) Diperlukan penciptaan jaringan jalan serta

akses mobilitas penduduk yang baik dalam meningkatkan keterkaitan yang kuat antar kecamatan di Kabupaten Tegal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, R. (2012). Analisis Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Banjarnegara. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dalam angka 2014. [Http://www.jateng.bps.go.id](http://www.jateng.bps.go.id). Diunduh pada tanggal 26 April 2015.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal dalam angka 2014. [Http://www.tegalkab.bps.go.id](http://www.tegalkab.bps.go.id). Diunduh pada tanggal 8 September 2015.
- Buyung Sarita dkk. 2014. Analisis Fungsi Fungsi Pelayanan Pusat Kecamatan Pada Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Kabupaten Bombana. *Jurnal Perencanaan Wilayah*. Volume 1, No.1.
- Darmansyah, Asep, et al. 2014. The New Growth Centres and Strategy for Building and Accelerating Agribusiness Development in Cirebon Regency, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 115, pp.296-304.
- Iskandar, Adi Yusuf. 2014. Analisis Pusat Pertumbuhan Pada Setiap Fungsi Pusat Pelayanan di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Kenny, David A. and David C Rubin. 1997. Estimating chance reproducibility in Guttman Scaling. *Social Science Research*, Vol. 6, Iss. 2, pg.188-196.
- Kuncoro, Mudjarad. 2007. Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: (UPP) STIM YKPN.
- Mulyanti, Kurniawati. 2007. Efisiensi dan Efektifitas Layanan Pada Satuan Pelayanan Satu Atap Kota Bekasi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032
- Prasetyo, Rindang Bangundan Muhammad Firdaus. 2009. Pengaruh Infratsruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia. Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Santoso, Eko Budi dan Rifki Alvian Syafi'i. 2015. Identifikasi Kemampuan Pelayanan Ekonomi dan Aksesibilitas Pusat Kegiatan Lokal Ngasem di Kabupaten Kediri. *Jurnal Teknik ITS*. Volume 4, No. 1.

Sari, Fika Novitadan Sri Maryati. 2013. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Perkembangan Wilayah di Indonesia. Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB.

Strauss, David J. 1980. Chance in Guttman scaling.  
*Social Science Research*, Vol.9, Iss.1, pg.76-82.

Tarigan, Robinson. 2007. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.